

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, Manajemen Kearsipan Elektronik, (Yogyakarta: Gava Media, 2014).
- Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi perkantoran Modern, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Bachrudin, Hukum Kenotariatan, (Bandung : Refika Aditama, 2019).
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). (ISBN: 978-979-605-211-0).
- Dhanang Widijawan, Dasar – Dasar Hukum Kontrak Bisnis Cetakan Kesatu, (Bandung: Keni Media, 2018).
- Didik J. Rachbini, Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia: Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001).
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum teknologi Informasi, (Bandung: Refika Aditma, 2005)
- Ghansam Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Jakarta Prenada Media Group, 2018).
- H. Ishaq, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2020).
- H.R Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). (ISBN: 979-107-359-7).
- Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan Tulisan), (Bandung : mandarmaju, 2009)
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama: 2009).
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020).
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), (ISBN: 978-602-881-723-3)
- Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009).
- Johny Ibrahim, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafah dan Teori Hukum, (Bandung: PT.
- Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989)

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Syamsul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Jakarta: Prenada Media, 2010).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran: dan, Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). (ISBN: 979-342-150-9)
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) (ISBN: 978-979-769-386-2)

INTERNET/WEBSITE

- Notaris Lamongan, “Tugas dan Fungsi Notaris dan PPAT”, <https://www.notarislamongan.or.id/article/tugas-dan-fungsi-notaris-ppat>, diakses pada tanggal 27 April 2024
- Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, “Refleksi Pelaksanaan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, <http://www.pemantauperadilan.com/opini/30.MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DAN%20CITA%20NEGARA%20HUKUM%20INDONESIA.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2024.
- “Peluang Cyber Notary di Indonesia”, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 2 Maret 2024.

JURNAL

- Antonio Ruiz-Martínez , Daniel Sánchez-Martínez, María Martínez-Montesinos and Antonio F. Gómez-Skarmeta, "A Survey of Electronic Signature Solutions in Mobile Devices" Vol. 2, No 3 (2007)
- Desy Rositawati, I Made Arya Utama, dan Desak Putu Dewi Kasih, “Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Juwono Sudarsono, *Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*, *Majalah Prisma* No.8 Tahun XIX, LP3ES, 1990.
- M. Javana Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti, dan Adetya Firnanda, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol 6, No. 3, 2024.

- Machsun Rifauddin, “Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi”, Yogyakarta: JURNAL KHIZANAH AL-HIKMAH Vol. 4 No. 2, Juli – Desember, 2016.
- Mohamat Riza Kuswanto, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, Surakarta: JURNAL REPERTORIUM Volume IV No. 2 Juli – Desember, Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Sari Mandiana, “Handout Cyber Law”, Surabaya : Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Sufy Anggraini, Rizki Savira Firdaus, Windy Amanda Siwi Suherlan, “Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik”, Notaire, Vol.6, No.3, 2023
- Surya Jaya, “Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Pembuktian”, Makassar: Makalah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011.
- Widiatmoko Adi Putranto, 2017, “Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna”, Yogyakarta: JURNAL DIPLOMATIK Vol. 1 No. 1 September, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik”, Malang: Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

UNDANG-UNDANG

- Undang – Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah